

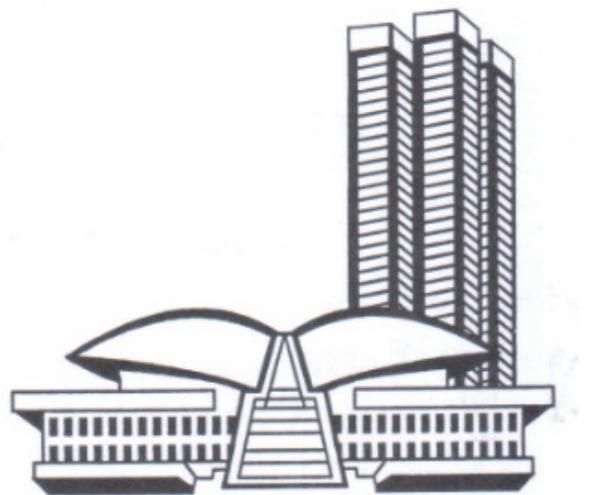
# *Kajian*

**Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan**

Vol. 24, No. 2, Tahun 2019

ISSN 0853-9316

- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION*  
*oleh: Monika Suhayati*
- VALUASI EKONOMI KOMUNITAS ADAT DI DALAM DAN SEKITAR KAWASAN HUTAN  
*oleh: Yayan Hidayat dan Anang Fajar Sidik*
- STRATEGI PENGEMBANGAN *BAITUL MAL WATTAMWIL* SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
*oleh: Sony Hendra Permana dan Masyithah Aulia Adhiem*
- ANALISIS PENGARUH *FLYPAPER EFFECT* PADA DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA  
*oleh: Ari Mulianta Ginting*
- STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DI KABUPATEN NIAS SELATAN  
*oleh: Nanda Puspita*



Diterbitkan oleh  
Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI



# *Kajian*

**Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan**

Vol. 24, No. 2, Tahun 2019

ISSN 0853-9316

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	i-ii
● PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN <i>INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION</i> oleh: <i>Monika Suhayati</i> .....	75-90
● VALUASI EKONOMI KOMUNITAS ADAT DI DALAM DAN SEKITAR KAWASAN HUTAN oleh: <i>Yayan Hidayat dan Anang Fajar Sidik</i> .....	91-104
● STRATEGI PENGEMBANGAN <i>BAITUL MAL WATTAMWIL</i> SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH oleh: <i>Sony Hendra Permana dan Masyithah Aulia Adhiem</i> .....	105-114
● ANALISIS PENGARUH <i>FLYPAPER EFFECT</i> PADA DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA oleh: <i>Ari Mulianta Ginting</i> .....	115-133
● STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DI KABUPATEN NIAS SELATAN oleh: <i>Nanda Puspita</i> .....	135-147



## PENGANTAR REDAKSI

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Vol. 24, No. 2, Tahun 2019. Terdapat lima tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan dari baik dari penulis internal Pusat Penelitian maupun penulis eksternal.

Tulisan pertama berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *International Child Abduction*”, yang ditulis oleh Monika Suhayati dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Artikel ini mengulas mengenai perlindungan hukum bagi anak korban perceraian pada perkawinan campuran yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya, kerap terjadi perselisihan pengasuhan anak dan mengakibatkan *international child abduction*. *International child abduction* belum diatur di Indonesia, namun telah diatur secara internasional dalam Hague Convention 1980 yang bertujuan melindungi anak dari dampak berbahaya dari pemindahan yang salah dan menetapkan prosedur untuk memastikan mereka segera kembali ke negara tempat tinggal kebiasaan mereka. Indonesia belum menjadi peserta Hague Convention 1980. Indonesia perlu segera meratifikasi Hague Convention 1980 demi memberikan perlindungan hukum bagi anak korban *international child abduction* agar proses pengembalian anak dapat dilakukan sesegera mungkin demi mengutamakan kepentingan terbaik dari anak.

Artikel kedua adalah tentang “Valuasi Ekonomi Komunitas Adat di dalam dan Sekitar Kawasan Hutan”, yang ditulis oleh Yayan Hidayat dan Anang Fajar Sidik dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan *National Council on Urban Economic Development Community*. Artikel ini menemukan bahwa menunjukkan bahwa nilai ekonomi yang didapatkan di beberapa komunitas di dalam maupun sekitar kawasan hutan ternyata lebih menguntungkan apabila dikelola langsung oleh masyarakat setempat.

Tulisan ketiga membahas isu pembiayaan syariah dengan judul “Strategi Pengembangan *Baitul Mal Wattamwil* Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”, yang ditulis oleh Sony Hendra Permana dan Masyithah Aulia Adhiem dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. BMT memiliki kekuatan untuk bersaing dengan lembaga jasa keuangan formal lain sebagai alternatif pembiayaan. Ditambah adanya dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan koperasi syariah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang menetapkan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan peningkatan manajemen usaha koperasi secara berkelanjutan. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh BMT, yakni kesulitan permodalan, terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi sertifikasi di bidang perkoperasian dan keuangan syariah, pemahaman masyarakat akan sistem keuangan syariah yang masih sangat rendah, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas koperasi. Untuk itu diperlukan strategi pengembangan usaha BMT dengan peningkatan kemampuan SDM, penguatan manajemen usaha koperasi, edukasi ke masyarakat melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain itu juga adanya penyediaan SDM, penguatan otoritas pembinaan dan pengawasan, serta kemudahan proses sertifikasi DPS yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait, sangat diperlukan bagi BMT.

Tulisan keempat ditulis oleh Ari Mulianta Ginting dengan judul “Analisis Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan dana perimbangan akan mendorong belanja total, belanja publik sektor pendidikan dan belanja publik sektor kesehatan. Peningkatan belanja publik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Tulisan yang terakhir berjudul “Strategi Pengembangan Kawasan Wisata di Kabupaten Nias Selatan”, yang ditulis oleh Nanda Puspita dari Sekretariat Jenderal DPD RI. Nias Selatan terpilih sebagai venue perlombaan *World Surf League (WSL)* tingkat dunia pada agustus 2018. Peluang ini seyogyanya menjadi pendorong bagi pemerintah setempat dalam menentukan langkah tepat dan perencanaan strategis untuk mendukung pengembangan daya saing lokal utamanya sektor pariwisata. Namun demikian, sampai saat ini Kabupaten Nias Selatan nyatanya masih menjadi salah satu kawasan daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 - 2019. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan kawasan wisata selain faktor anggaran, karakteristik masyarakat nias juga upaya kelembagaan yang belum mendapatkan tanggapan dari lembaga legislasi setempat.

Demikianlah kelima karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian Vol. 24, No. 2, Tahun 2019. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. YB Suhartoko, Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D, Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M, Ph.D, Prof. Dr. Achmad Suryana dan Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, September 2019

Redaksi

## **LEMBAR ABSTRAK**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

---

Monika Suhayati (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION***

Kajian Vol. 24, No. 2, Tahun 2019, hlm. 73-88

Perselisihan hak asuh anak seringkali menjadi persoalan yang rumit dalam suatu perceraian pada perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Hak asuh anak akibat perceraian dari perkawinan campuran telah diatur dalam hukum di Indonesia, namun kerap terjadi pengambilan paksa atau penculikan oleh orang tua si anak dari tempat kediaman sehari-hari anak ke negara lain. Tulisan ini hendak menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian pada perkawinan campuran, pengaturan *international child abduction* dalam *The Hague Convention 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction*, dan sikap Indonesia terhadap konvensi tersebut. Analisa permasalahan menggunakan Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi anak korban perceraian pada perkawinan campuran telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada anak yang sudah dapat menentukan pilihan untuk memilih berada dalam pengasuhan ayah atau ibunya sesuai keinginannya. Namun dalam pelaksanaannya, kerap terjadi perselisihan pengasuhan anak dan mengakibatkan *international child abduction*. *International child abduction* belum diatur di Indonesia, namun telah diatur secara internasional dalam *Hague Convention 1980* yang bertujuan melindungi anak dari dampak berbahaya dari pemindahan yang salah dan menetapkan prosedur untuk memastikan mereka segera kembali ke negara tempat tinggal kebiasaan mereka. Indonesia belum menjadi peserta *Hague Convention 1980*. Dari beberapa kasus terlihat penanganan kasus *international child abduction* di Indonesia yang belum mengutamakan kepentingan terbaik anak. Indonesia perlu segera meratifikasi *Hague Convention 1980* demi memberikan perlindungan hukum bagi anak korban *international child abduction* agar proses pengembalian anak dapat dilakukan sesegera mungkin demi mengutamakan kepentingan terbaik dari anak.

**Kata kunci:** perkawinan campuran, perlindungan hukum, tempat kediaman anak sehari-hari.

## **VALUASI EKONOMI KOMUNITAS ADAT DI DALAM DAN SEKITAR KAWASAN HUTAN**

Kajian Vol. 24, No. 2, Tahun 2019, hlm. 89-102

Tulisan ini menjelaskan pola pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh komunitas masyarakat sekitar, maupun di dalam kawasan hutan. Per tahun 2018 terdapat 25.863 desa di dalam kawasan hutan. Ragam ketentuan regulasi melarang aktivitas pemanfaatan hutan di dalam kawasan hutan, sementara penetapan status kawasan hutan cenderung bersifat politis. Dibuktikan dengan masih ada 48,8 juta orang yang mendiami kawasan hutan dan 10,2 juta nya tergolong sebagai penduduk miskin di dalam kawasan hutan. Output penelitian mencoba menawarkan solusi mengenai pengentasan kemiskinan di dalam dan sekitar kawasan hutan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi langsung. Pendekatan utama yang digunakan adalah perspektif pembangunan berkelanjutan. Studi dilakukan di 6 komunitas adat yang berada di dalam kawasan hutan yakni Komunitas Karang - Lebak, Komunitas Kajang - Bulukumba, Komunitas Kallupini - Enrekang, Komunitas Seberuang - Sintang, Komunitas Saureinu - Mentawai, dan Komunitas Moi Kelim - Sorong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi yang didapatkan di beberapa komunitas di dalam maupun sekitar kawasan hutan ternyata lebih menguntungkan apabila dikelola langsung oleh masyarakat setempat.

**Kata kunci:** kemiskinan, kawasan hutan, komunitas adat, pembangunan berkelanjutan.

**STRATEGI PENGEMBANGAN *BAITUL MAL WATTAMWIL*  
SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

Kajian Vol. 24, No. 2, Tahun 2019, hlm. 103-112

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang menganut sistem keuangan syariah di Indonesia. BMT juga memiliki landasan filosofis yang berorientasi pada pemberdayaan sehingga terjalin kemitraan antara BMT dengan nasabah. BMT memiliki kemudahan dalam prosedur, keringanan persyaratan, cepatnya pelayanan, dan sistem “jemput bola”, yang menjadi kekuatan bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Namun sayangnya *share* BMT terhadap sistem keuangan formal syariah di Indonesia masih sangat kecil. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan BMT sebagai lembaga jasa keuangan mikro yang dapat diakses UMKM dan berbagai permasalahannya. Artikel ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BMT memiliki kekuatan untuk bersaing dengan lembaga jasa keuangan formal lain sebagai alternatif pembiayaan. Ditambah adanya dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan koperasi syariah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang menetapkan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan peningkatan manajemen usaha koperasi secara berkelanjutan. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh BMT, yakni kesulitan permodalan, terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi sertifikasi di bidang perkoperasian dan keuangan syariah, pemahaman masyarakat akan sistem keuangan syariah yang masih sangat rendah, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas koperasi. Untuk itu diperlukan strategi pengembangan usaha BMT dengan peningkatan kemampuan SDM, penguatan manajemen usaha koperasi, edukasi ke masyarakat melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain itu juga adanya penyediaan SDM, penguatan otoritas pembinaan dan pengawasan, serta kemudahan proses sertifikasi DPS yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait, sangat diperlukan bagi BMT.

**Kata kunci:** BMT, UMKM, Pembiayaan, Koperasi Syariah.

---

Ari Mulianta Ginting (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

**ANALISIS PENGARUH *FLYPAPER EFFECT* PADA DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Kajian Vol. 24, No. 2, Tahun 2019, hlm. 113-130

Desentralisasi fiskal merupakan bentuk dari otonomi keuangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya transfer dana bagi pemerintah daerah merupakan pendanaan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan melaksanakan fungsi kewenangan sedangkan sumber pendapatan diharapkan dari pendapatan asli daerah. Namun pada kenyataannya, transfer fiskal menjadi sumber utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Dengan menggunakan data periode tahun 2013-2018 dan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan memakai metode panel regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga model yang digunakan baik belanja total, belanja publik sektor pendidikan dan belanja publik sektor kesehatan terjadi flypaper effect. Hasil ini berdampak setiap peningkatan dana perimbangan akan mendorong belanja total, belanja publik sektor pendidikan dan belanja publik sektor kesehatan. Peningkatan belanja publik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

**Kata kunci:** desentralisasi fiskal, *panel regresion model*, belanja daerah, *flypaper effect*.

## **STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DI KABUPATEN NIAS SELATAN**

Kajian Vol. 24, No. 2, Tahun 2019, hlm. 131-143

Nias Selatan terpilih sebagai *venue* perlombaan *World Surf League* (WSL) tingkat dunia pada Agustus 2018. Tidak hanya ketinggian ombak yang sempurna tetapi juga panorama alam yang memukau menjadikan Nias Selatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan perhelatan *surfing* bertaraf internasional. Peluang ini seyogyanya menjadi pendorong bagi pemerintah setempat dalam menentukan langkah tepat dan perencanaan strategis untuk mendukung pengembangan daya saing lokal utamanya sektor pariwisata. Namun demikian, sampai saat ini Kabupaten Nias Selatan nyatanya masih menjadi salah satu kawasan daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 - 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kawasan pariwisata dan strategi pengembangan pariwisata yang telah di terapkan di Kabupaten Nias Selatan untuk kemudian memberikan rekomendasi alternatif kebijakan kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan dan studi literatur dalam proses pengumpulan data. Dari penelitian ini ditemukan bahwa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan kawasan wisata selain faktor anggaran, karakteristik masyarakat nias juga upaya kelembagaan yang belum mendapatkan tanggapan dari lembaga legislasi setempat

**Kata kunci:** potensi pariwisata, strategi pengembangan, Ripparkab, Kabupaten Nias Selatan.

